1. LATAR BELAKANG

1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

B. DATA GEORAFIS WILAYAH

Secara astronomi Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur (BT) dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan (LS) yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepahiang memiliki batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan bukit barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan air laut (dpl). Memiliki relif tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan yang cukup tajam dan curam (diatas 40%) terutama yang termasuk Jalur pegunungan Bukit Barisan.

Luas wilayah Kabupaten kepahiang ± 66.500 Ha yang terdiri dari 8 Kecamatan, 105 Desa dan 12 Kelurahan yaitu:

- Kecamatan Muara Kemumu terdiri 8 Desa;
- Kecamatan Bermani Ilir terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Seberang Musi terdiri 13 desa;
- Kecamatan Tebat Karai terdiri 13 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Kepahiang terdiri 16 desa dan 7 kelurahan;
- Kecamatan Ujan Mas terdiri 16 Desa dan 1 kelurahan;

- Kecamatan Merigi terdiri 7 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Kabawetan terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan.

C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 mencapai 152.685 jiwa sedangkan pada tahun 2021 mencapai 152.832 jiwa jadi penambahan penduduk kabupaten kepahiang mencapai 0,99 % pertahun.

Berdasarkan hasil Data Konsolidasi Bersih (DBK) Semester II Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang Semester II Tahun 2021 yaitu sebanyak 152.832 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Kepahiang per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Data Kependudukan Semester II Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bermani Ilir	7.977	7.386	15.363
2	Ujan Mas	12.128	11.488	23.616
3	Tebat Karai	7.838	7.323	16.162
4	Kepahiang	26.424	25.181	51.610
5	Merigi	6.029	5.774	11.803
6	Kabawetan	6.827	6.371	13.198
7	Seberang Musi	4.261	3.796	8.057
8	Muara Kemumu	7.299	6.824	14.123
Jumlah		78.701	74.085	152.832

Sumber : DBK Semester II Tahun 2021

D. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021 dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari :

1. SEKRETARIAT DAERAH;
2. SEKRETARIAT DPRD;
3. INSPEKTORAT DAERAH;
4. DINAS DAERAH terdiri dari :
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   b. Dinas Lingkungan Hidup;
   c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
   d. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

g. Dinas Sosial;
h. Dinas Pertanian;
i. Dinas Kesehatan;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
l. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
q. Dinas Perhubungan;
r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
s. RSUD.

5. BADAN DAERAH :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. Badan Keuangan Daerah;
   c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia;
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. KECAMATAN :
   a. Kecamatan Kepahiang;
   b. Kecamatan Merigi;
   c. Kecamatan Ujan Mas;
   d. Kecamatan Kabawetan;
   e. Kecamatan Tebat Karai;
   f. Kecamatan Seberang Musi;
   g. Kecamatan Bermani Ilir;
   h. Kecamatan Muara Kemumu;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 berjumlah 2.837 orang dengan komposisi PNS berjumlah 2.816 orang dan PPPK berjumlah 21 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Laki-laki PNS berjumlah 1.153 orang, PPPK berjumlah 14 orang dan Perempuan berjumlah 1.663 orang dan PPPK berjumlah 7 orang.

1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur
2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan.
5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun 2016-2021 yaitu : **"Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera".**

2. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelengaraan pemerintah daerah secara umum. Capain kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Capain kinerja makro Kabupaten Kepahiang tahun 2021:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2021= 68,62 meningkat 0,66 persen dari tahun 2020 sebesar 68,17.
2. Angka kemiskinan pada tahun 2021= 14,83 meningkat 0,95 persen dari tahun 2020 sebesar 14,69.
3. Angka pengangguran pada tahun 2021= 1,8 menurun sebesar -28,57 persen dari tahun 2020 sebesar 2,52.
4. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021= 3,16 meningkat 5166,67 persen dari tahun 2020 sebesar 0,06.
5. Pendapatan perkapita atas harga berlaku (ADHB)(juta rupiah)* pada tahun 2021= 31,31 menurun sebesar -1,88 persen dari tahun 2020 sebesar 31,91.
6. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,275 menurun sebesar 0,32 persen dari tahun 2020 sebesar 0,307.

Capain kinerja makro Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun		
		2020	2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,17	68,62	0,66
2.	Angka Kemiskinan	14,69	14,83	0,95
3.	Angka Pengangguran	2,52	1,8	-28,57
4.	Pertumbuhan Ekonomi	0,06	3,16	5166,67

5.	Pendapatan Perkapita	31,91	31,31	-1,88
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,307	0,275	0,32

Sumber data: BPS Kabupaten Kepahiang 2022

Di lihat dari capaian kinerja makro angka kemiskinan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,95 persen, dan angka pengangguran menurun sebesar -28,57 persen sementara pendapatan perkapita menurun sebesar -1.88 persen dari tahun 2020 sebesar 31,91

3. CAPAIAN KINERJA KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar pada tahun anggaran 2021 dapat dilahat pada tabel sebagai berikut :

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		Sumber Data	Ket
						Elemen data	Capaian Kinerja		
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	,,,,,, ,.%	3401	67,96	DIKBUD	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		5004		CAPIL	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	,,,,,,,.%	15.438	98,63	DIKBUD	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		15.652		CAPIL	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	,,,,,,,.%	6.382	83,62	DIKBUD	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		7.632		CAPIL	

		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	,,,,,,,.%	321	73,96	DIKBUD	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		434		DIKBUD	
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		124	0,08	RSUD	
				Jumlah Penduduk kabupaten		152.832		CAPIL	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	,,,,,,.%	1	100,00	RSUD	
				Jumlah RS kabupaten		1			
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	,,,,,,,%	2.172	82,96	DINKES	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		2.618			
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	,,,,,,,%	2.084	83,39		
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		2.499			
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	2.025	85,08		
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		2.380			
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	,,,,,,,%	6.647	72,25		

				sesuai standar					
				Jumlah balita di kabupaten		9.199			
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	19.261	93.69		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		20.557			
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	82.404	84,04		
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		98.052			
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,%	6.530	46,92		
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		13.916			
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	15.298	50,76		
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		30.133			
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	904	76,61		
				Jumlah penderita DM di kabupaten		1.180			
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	216	95,57		

			standar	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		226			
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,%	3.309	67,53		
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		4.900			
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	,,,,,,,%	2.695	83,93		
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		3.211			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,.%	20	0,18	DPU	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		10.676			
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,%	1	100,00		
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1			

		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,%	340	90,31		
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		3.765			
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	,,,,,.%	44.530	88,94		
				Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		50.067			
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	,,,,,,%	40.208	98,18		
				Jumlah rumah di Kabupaten		40.951			
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	,,,,,,,%	77	2,89		
				Jumlah IMB yang berlaku		2.664			
		25	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	,,,,,,,%	258.03	50,44		
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		511.49			

		26	Raisio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di ilayah kabupaten/kota yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	,,,,,,.%	1	100,00		
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota		1			
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengaasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	,,,,,,%	1	100,00		
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		1			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	,,,,,,,%	1	100,00		
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		1			
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	,,,,,,%	1	100,00		
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		1			

		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	,,,,,,%	8.5	11,70		
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		72.62			
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	,,,,,,.%	1.574	38,44		
				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		40.951			
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	,,,,,,.%	30	0,073		
				Jumlah unit rumah kab/kota		40.951			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	,,,,,,.%	258	98,85	SATPOL PP DAN DAMKAR	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		261			
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	,,,,,,,%	9	81,81		
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		11			
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	137.174	137,174	BPBD	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	42	42		
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	633	633,00		

		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	,,,,,,.%	18	100,00	SATPOL PP DAN DAMKAR	
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		18			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	15	15,00		
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	,,,,,,,%	841	13,37	DINSOS	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		6.289			

		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	,,,,,,,.%	18	81,81		
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		22			

4. HASIL EVALUASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

4.1 EVALUASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021 atas LPPD tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/0931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 hal : Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Untuk hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang tahun 2020, hingga ditayangkannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

4.2 OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31

Desember 2020. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta catatan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan tersebut opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 adalah **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)**.

5. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

5.1. Ringkasan Realisasi Penerimaan

Ringkasan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1 sebagai Berikut:

Tabl 5.1

Ringkasan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	ANGGARAN/TARGET 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	38.684.583.009,00	34.598.123.402,82	89,44
2.	Pendapatan Transper	743.762.214.759,00	715.126.669.990,00	96,15
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.199.685.995,00	22.167.443.995,00	99,85
PENDAPATAN DAERAH		804.646.483.763,00	771.892.237.402,82	95,93

Sumber: BKD Kab. Kepahiang

5.2. Ringkasan Realisasi Pengeluaran

Ringkasan realisasi pengeluaran daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggarn 2021 dapat dilihat tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2

Ringkasan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	ANGGARAN/TARGET 2021	REALISASI 2021	(%)
1.	Belanja Operasional	514.770.698.165,56	474.600.928.624,37	92,20
2.	Belanja Modal	161.564.833.655,00	142.749.472.871,40	88,35
3.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.805.205.038,64	93,51
4.	Belanja Transfer	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	99,98
BELANJA DAERAH		**819.952.739.260,56**	**760.749.108.034,41**	**92,78**

Sumber: BKD Kab. Kepahiang

6. INOVASI DAERAH

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan daya saing daerah, banyak inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.1

INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NO.	OPD	INOVASI
1.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**WARUNG POJOK** (Way Riang Uku Ngurus Delai Dapet Tojoak Artinya Senangnya Aku Membuat 1 Dapay 7)
		AMI ALEW AU (Awak Meneh Delai Dapet Telew Au Artinya Kamu Buat 1 Dapat 3 ya)
		SI PETI MANTAP (Sistem Pelayanan Terintegrasi Lima Tahapan**)**
		PKS SI ADEL (Perjanjian Kerjasama Siap Delivery)
		PERAWAT 1708 (Pelayanan Masyarakat Via WhatsApp Kabupaten Kepahiang)
		SEHATI PADAKU (Semua Harus Tertib Administrasi Penduduk Akan Mendapat Keberuntungan)
2.	BADAN KEUANGAN DAERAH	**LELANG BARANG MILIK DAERAH MODEL E-AUCTION**
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**SIKAB MANIS** (Sistem Kenaikan Gaji Berkala Otomatis**)**
4.	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	**PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN PENAHAN LONGSOR (VETIVER) DI KABUPATEN KEPAHIANG**
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**MEJA TEMA** (Media Pembelajaran Menggunakan Teknologi Animas)
6.	DINAS KESEHATAN	**KADER TANGGUH** (TANGGAP DAN SUNGGUH) UNTUK MENUJU HIDUP SEHAT DENGAN BINA KELUARGA
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**SI PELID** (Sistem Pemetaan Lingkungan Hidup)
8.	DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN	**PERAN CANDA** (Percepatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah)
		OLAHAN (Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan)
		JAPUNG (Jaring Apung)
9.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**SEPUTARAN** (Sistem Perizinan Berusaha Tanpa Bayaran)
		SIALEP (SISTEM ANTAR LENGKAP PERIZINAN)
		SITUNJANG MANIS (Sistem Informasi Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Usaha**)**
		PENYULUH (Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha)
10.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	**INTERNET SATU PINTU** (Kepahiang NET)
11.	SEKRETARIAT DPRD	**SENTRA PELAYANAN**
12.	INSPEKTORAT	**COACHING CLINIK**
13.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	**MAROBA SHIGOTO JEPANG**
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**INOVASI DIGITAL LIBERARY PERPUSTAKAAN**
15.	DINAS PERTANIAN	**TEKNIK KOPI SAMBUNG UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOPI ROBUSTA KEPAHIANG**
		SERTIFIKAT INDIKASI GOGRAFS (SIG) PERLLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPI ROBUSTA KEPAHIANG
		AGROWISATA KAMPOENG KOPI SEBAGAI WISATA

		BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN KEPAHIANG
16.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SISTEM PELAYANAN PELAPORAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA VIA WHATSAPP
17.	RSUD	RUANG RAWAT INAP COVID-19

7. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pemerintah daerah baik mikro maupun makro dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Kepahiang yaitu **"Maju Mandiri Sejahtera"** yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan kemajuan pembangunan Kabupaten Kepahiang pada umumnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang pada khususnya.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin dan petunjuk kepada Kita.

Sekian dan terima Kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb

Kepahiang, Mei 2022
BUPATI KEPAHIANG,

BUPATI KEPAHIANG

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHID, MM.,IPU

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHID, MM